



Gender dan Global Governance dalam Kontribusi *Women Empowerment* terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Dilla Nasution

E-Mail: dillanasution080104@gmail.com

Independent Research

Abstract (English)

This study aims to analyze the role of gender and global governance in the contribution of women's empowerment to Indonesian foreign policy. In the dynamics of contemporary international relations, issues of gender equality and women's empowerment are increasingly gaining attention as an integral part of global governance. Indonesia, as an active country in various international forums, demonstrates its commitment to gender mainstreaming through women's participation in diplomacy, foreign policy formulation, and involvement in global agendas such as peace, security, and sustainable development. This research uses a qualitative approach using literature review and policy analysis methods to examine how the global governance framework influences the integration of a gender perspective into Indonesian foreign policy. The results indicate that women's empowerment contributes to strengthening foreign policy legitimacy, increasing sensitivity to humanitarian issues, and encouraging a more inclusive and sustainable diplomatic approach. However, the implementation of gender-based policies still faces structural, cultural, and institutional challenges, both at the national and international levels. Therefore, strengthened political commitment, cross-institutional coordination, and more progressive regulatory support are needed to optimize women's empowerment as a strategic instrument in Indonesian foreign policy.

Article History

Submitted: 12 December 2025

Accepted: 21 December 2025

Published: 22 December 2025

Key Words

gender, global governance, women's empowerment, foreign policy, Indonesia.

Abstrak (Indonesia)

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran gender dan global governance dalam kontribusi *women empowerment* terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin memperoleh perhatian sebagai bagian integral dari tata kelola global. Indonesia, sebagai negara yang aktif dalam berbagai forum internasional, menunjukkan komitmen terhadap pengarusutamaan gender melalui partisipasi perempuan dalam diplomasi, perumusan kebijakan luar negeri, serta keterlibatan dalam agenda global seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menelaah bagaimana kerangka global governance memengaruhi integrasi perspektif gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa *women empowerment* berkontribusi dalam memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri, meningkatkan sensitivitas terhadap isu kemanusiaan, serta mendorong pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, implementasi kebijakan berbasis gender masih menghadapi tantangan struktural, budaya, dan institusional, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan regulasi yang lebih progresif agar pemberdayaan perempuan dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Sejarah Artikel

Submitted: 12 December 2025

Accepted: 21 December 2025

Published: 22 December 2025

Kata Kunci

gender, global governance, women empowerment, kebijakan luar negeri, Indonesia.





I. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika hubungan internasional pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara negara merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negerinya (Prajuli, 2021). Tidak lagi semata-mata berfokus pada kepentingan keamanan dan ekonomi, kebijakan luar negeri kini juga dipengaruhi oleh isu-isu nontradisional seperti hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, demokrasi, serta kesetaraan gender. Dalam konteks ini, gender menjadi variabel penting yang semakin diperhitungkan dalam kerangka global governance, terutama dalam upaya mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) di berbagai sektor strategis, termasuk diplomasi dan pengambilan keputusan internasional. Global governance sebagai suatu konsep merujuk pada mekanisme, norma, institusi, dan aktor yang mengatur hubungan internasional di luar kerangka negara semata (Wuryandari, 2025). Dalam sistem global yang semakin kompleks dan saling terhubung, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan, melainkan berinteraksi dengan organisasi internasional, masyarakat sipil, serta aktor non-negara lainnya (Ricarvy, 2024). Dalam kerangka ini, isu gender memperoleh ruang yang lebih luas melalui berbagai kesepakatan internasional dan agenda global yang menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai prasyarat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan (Ruland, 2017).

Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam global governance menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) merupakan salah satu isu utama dalam agenda global governance yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Azis, 2023). Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu perempuan, tetapi juga mencakup penguatan peran perempuan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri, pemberdayaan perempuan berkontribusi pada terciptanya pendekatan diplomasi yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada solusi jangka panjang, khususnya dalam isu-isu perdamaian, resolusi konflik, dan kerja sama pembangunan. Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif memiliki posisi strategis dalam merespons agenda gender dan global governance (Firdaus, 2023). Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender tercermin dalam berbagai kebijakan nasional serta keterlibatannya dalam forum-forum internasional yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan (Azizah, 2021).

Partisipasi perempuan dalam diplomasi Indonesia, baik sebagai diplomat, perumus kebijakan, maupun representasi negara di tingkat global, menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan luar negeri. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung agenda internasional yang menekankan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, serta pembangunan berkelanjutan (Veronika, 2025). Meskipun demikian, integrasi gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan luar negeri Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan struktural, norma budaya patriarkal, serta keterbatasan representasi perempuan dalam posisi strategis sering kali membatasi optimalisasi peran perempuan dalam diplomasi dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Yartseva, 2020). Di sisi lain, implementasi komitmen global ke dalam kebijakan nasional tidak selalu berjalan secara konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma internasional dan praktik kebijakan di tingkat domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen normatif terhadap kesetaraan gender perlu diikuti oleh langkah-langkah konkret yang berkelanjutan (Rosyidin, 2017).

Kajian mengenai gender dan global governance dalam kontribusi *women empowerment* terhadap kebijakan luar negeri Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana



perspektif gender telah diarusutamakan dalam kebijakan luar negeri nasional. Analisis ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global. Dengan menelaah hubungan antara gender, global governance, dan kebijakan luar negeri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis pemberdayaan perempuan dalam memperkuat posisi Indonesia di arena internasional (Islam, 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam perspektif gender. Selama ini, kajian kebijakan luar negeri cenderung didominasi oleh pendekatan negara-sentris dan maskulin yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai fokus utama. Dengan memasukkan perspektif gender dan *women empowerment*, penelitian ini berupaya menawarkan sudut pandang alternatif yang menekankan pentingnya inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gender dan global governance dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia menjadi relevan dan signifikan untuk menjawab tantangan global di era kontemporer (Marty, 2004).

II. LANDASAN TEORI

A. Gender dalam Perspektif Hubungan Internasional

Gender dalam perspektif hubungan internasional dipahami sebagai konstruksi sosial yang membentuk peran, identitas, dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks politik global. Berbeda dengan pendekatan tradisional hubungan internasional yang cenderung bersifat negara-sentris dan menitikberatkan pada isu keamanan serta kekuasaan, perspektif gender menyoroti bagaimana struktur dan praktik internasional sering kali mereproduksi ketimpangan berbasis gender (Anggraheni, 2024). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan luar negeri, diplomasi, dan institusi internasional tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan relasi sosial yang secara historis didominasi oleh perspektif maskulin. Teori feminisme dalam hubungan internasional menekankan bahwa pengalaman dan peran perempuan selama ini kurang terwakili dalam analisis politik global, meskipun perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam isu perdamaian, keamanan, dan pembangunan (Wardhani, 2020).

Perspektif ini mengkritik dikotomi publik–privat yang menempatkan isu-isu keamanan dan politik tingkat tinggi sebagai domain laki-laki, sementara isu sosial dan kemanusiaan diposisikan sebagai sekunder. Akibatnya, kebijakan luar negeri kerap mengabaikan dampak kebijakan terhadap perempuan serta potensi perempuan sebagai aktor strategis dalam hubungan internasional. Dalam perkembangan kontemporer, perspektif gender dalam hubungan internasional tidak hanya berfokus pada representasi perempuan, tetapi juga pada transformasi struktur dan norma global agar lebih inklusif. Pengarusutamaan gender dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik internasional mempertimbangkan kepentingan serta pengalaman semua kelompok secara adil (Cameron, 2023). Dengan demikian, pendekatan gender berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang keamanan, kekuasaan, dan kepentingan nasional, serta mendorong kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan global (Aziz, 2022).



Tabel 1. Temuan UN Women Terkait Gender dan Tata Kelola Global

Aspek	Temuan Utama UN Women	Sumber Laporan Resmi
Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan global	Perempuan masih kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan luar negeri, termasuk diplomasi formal dan negosiasi internasional	<i>Progress of the World's Women 2019–2020</i>
Gender dan perdamaian global	Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian berkontribusi terhadap keberlanjutan perdamaian dan stabilitas pascakonflik	<i>Women, Peace and Security Global Study</i>
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan	Integrasi perspektif gender meningkatkan kualitas kebijakan publik, legitimasi institusi, dan efektivitas tata kelola	<i>Progress of the World's Women 2019–2020</i>
Gender dan pembangunan berkelanjutan	Kesetaraan gender merupakan prasyarat pencapaian pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global yang inklusif	<i>UN Women Strategic Plan</i>
Rekomendasi kebijakan global	Negara didorong untuk memperkuat regulasi, meningkatkan representasi perempuan, dan mengintegrasikan gender dalam kebijakan nasional dan internasional	<i>Women, Peace and Security Global Study</i>

Sumber: UN Women Report (2019–2020), *Progress of the World's Women*; UN Women, *Women, Peace and Security Global Study*.

Berdasarkan temuan UN Women sebagaimana dirangkum dalam tabel di atas, terlihat bahwa isu gender telah menjadi bagian integral dalam diskursus tata kelola global dan kebijakan internasional. Kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan masih adanya ketimpangan struktural yang memengaruhi arah dan substansi kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. UN Women menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan aspek representasi, tetapi juga menyangkut kualitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Keterlibatan perempuan secara substantif dalam diplomasi dan proses perdamaian dipandang mampu memperkuat pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan luar negeri menjadi relevan dalam konteks global governance yang menuntut kolaborasi lintas aktor dan keadilan sosial. Temuan ini memperkuat landasan teoretis bahwa *women empowerment* bukan sekadar agenda normatif global, melainkan instrumen strategis dalam membangun kebijakan luar negeri yang responsif terhadap tantangan global kontemporer.

B. Global Governance dan Dinamika Kebijakan Luar Negeri

Global governance merujuk pada seperangkat mekanisme, norma, institusi, dan proses yang mengatur interaksi antaraktor dalam sistem internasional guna merespons tantangan global yang bersifat lintas negara (Aker, 2017). Berbeda dengan tata kelola





internasional tradisional yang berfokus pada peran negara sebagai aktor utama, global governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor non-negara, seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri tidak lagi dipahami sebagai instrumen negara yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan tata kelola global yang kompleks dan saling bergantung (Mubeen, 2022). Dinamika kebijakan luar negeri dalam kerangka global governance ditandai oleh meningkatnya pengaruh norma dan rezim internasional terhadap proses perumusan kebijakan nasional. Negara cenderung menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan standar global yang berkembang, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan, guna mempertahankan legitimasi dan kredibilitas di arena internasional. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bersifat adaptif dan dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan nasional dan tekanan normatif global (Achuo, 2022).

Dengan demikian, global governance berperan sebagai ruang di mana negara bernegosiasi, berkolaborasi, dan membentuk konsensus bersama terkait isu-isu global. Dalam perkembangan kontemporer, global governance juga memengaruhi perluasan agenda kebijakan luar negeri menuju isu-isu nontradisional, termasuk keamanan manusia, lingkungan, kesehatan global, dan kesetaraan gender. Perubahan ini mendorong transformasi pendekatan kebijakan luar negeri dari yang semula berorientasi pada kekuasaan dan keamanan negara menuju pendekatan yang lebih inklusif dan multidimensional. Negara dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai global ke dalam kebijakan luar negerinya tanpa mengabaikan kepentingan domestik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai global governance menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk dan dijalankan dalam konteks sistem internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung (Costinot, 2023).

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan/Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan bersifat konseptual-normatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran gender dan global governance dalam kontribusi *women empowerment* terhadap kebijakan luar negeri Indonesia melalui kajian teoretis dan normatif, bukan melalui pengujian empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti kuesioner, wawancara, maupun observasi lapangan. Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup buku teks akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan isu gender, tata kelola global, dan kebijakan luar negeri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses interpretatif dan analitis dengan menelaah konsep, teori, dan kerangka normatif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara gender, global governance, dan kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan pengayaan perspektif teoretis dalam kajian hubungan internasional kontemporer.



B. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis difokuskan pada penelaahan mendalam terhadap data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan resmi organisasi internasional yang relevan dengan isu gender, global governance, dan kebijakan luar negeri Indonesia. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep, pola pemikiran, serta kerangka normatif yang mendasari keterkaitan antarvariabel kajian. Tahapan analisis data diawali dengan proses klasifikasi dan kategorisasi sumber data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu gender dalam hubungan internasional, tata kelola global, dan *women empowerment*. Selanjutnya, dilakukan proses interpretasi dengan membandingkan berbagai perspektif teoretis dan normatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan luar negeri. Analisis juga dilakukan melalui sintesis literatur untuk mengaitkan konsep-konsep yang telah diidentifikasi ke dalam kerangka analisis yang koheren. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif dan argumentatif untuk menjelaskan hubungan antara gender dan global governance serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara logis dan konseptual, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hubungan internasional berbasis perspektif gender.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur akademik yang relevan dengan kajian gender, global governance, dan kebijakan luar negeri, termasuk buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta publikasi ilmiah yang membahas perspektif gender dalam hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan arah dan prinsip kebijakan luar negeri, khususnya yang memuat komitmen terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sumber data penting lainnya berasal dari laporan dan publikasi resmi organisasi internasional, terutama UN Women, yang menyediakan kerangka normatif global mengenai kesetaraan gender, *women empowerment*, serta peran perempuan dalam tata kelola global dan kebijakan internasional. Laporan lembaga internasional lain yang relevan dengan global governance dan pembangunan berkelanjutan juga digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkaya analisis konseptual. Seluruh sumber data dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi topik, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder yang bersifat teoretis dan normatif, penelitian ini berupaya membangun analisis yang sistematis dan komprehensif tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui kuesioner, wawancara, maupun studi lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integrasi Perspektif Gender dalam Kerangka Global Governance terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Integrasi perspektif gender dalam kerangka global governance menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan norma dan agenda global yang menekankan prinsip kesetaraan dan inklusivitas (Andriamahery, 2022). Dalam konteks ini, gender tidak diposisikan semata sebagai isu sosial, melainkan sebagai



bagian dari nilai normatif yang memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Global governance menyediakan ruang bagi negara untuk mengadopsi dan menyesuaikan norma internasional, termasuk pengarusutamaan gender, ke dalam kebijakan nasional guna menjaga legitimasi dan kredibilitas di tingkat global (United Nations Security Council, 2000). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia secara normatif telah mengakomodasi perspektif gender melalui komitmen terhadap berbagai kesepakatan internasional serta partisipasi aktif dalam forum global yang mengangkat isu kesetaraan gender. Integrasi ini tercermin dalam perluasan agenda kebijakan luar negeri yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga pada isu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Perspektif gender berperan dalam mendorong pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap kelompok rentan serta memperkuat dimensi human security dalam diplomasi Indonesia (Reshi, 2022).

Namun demikian, integrasi perspektif gender dalam kebijakan luar negeri Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara komprehensif. Tantangan muncul dalam bentuk kesenjangan antara komitmen global dan implementasi kebijakan di tingkat nasional, yang dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya, dan kelembagaan (Quisumbing, 2023). Global governance memberikan kerangka dan tekanan normatif, tetapi efektivitas integrasi gender sangat bergantung pada kapasitas internal negara dalam menerjemahkan norma global tersebut ke dalam kebijakan yang operasional. Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam kerangka global governance terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan (Parveen, 2022). Perspektif ini memperkaya arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan nilai keadilan dan inklusivitas, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan komitmen institusional agar norma gender global tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik kebijakan luar negeri (Desai, 2022).

Tabel 2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terkait Women, Peace and Security (WPS)

Nomor Resolusi	Tahun	Pokok Isi Utama
S/RES/1325	2000	Menekankan partisipasi penuh perempuan dalam pencegahan konflik, penyelesaian konflik, perdamaian, dan keamanan serta perlindungan perempuan dari kekerasan terkait konflik.
S/RES/1888	2009	Mempromosikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual dalam konflik, termasuk penempatan penasihat perlindungan perempuan.
S/RES/1889	2009	Memperkuat keterlibatan perempuan di semua tahap proses perdamaian, khususnya periode setelah perjanjian damai.
S/RES/2122	2013	Mendorong partisipasi strategis perempuan dalam perdamaian berkelanjutan dan aspek gender dalam resolusi konflik.
S/RES/2242	2015	Menguatkan agenda WPS, mendorong kerja sama dengan masyarakat sipil, dan integrasi gender dalam kerja Dewan Keamanan.





-
- | | | |
|------------|------|---|
| S/RES/2467 | 2019 | Menekankan penanganan kekerasan seksual sebagai bagian dari agenda WPS dan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil perempuan. |
| S/RES/2493 | 2019 | Mendorong implementasi penuh semua resolusi WPS sebelumnya dan pendekatan kontekstual untuk partisipasi perempuan. |
-

Sumber: United Nations Security Council (2000–2019)

Berdasarkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirangkum dalam tabel di atas, terlihat bahwa isu gender, khususnya melalui agenda *Women, Peace and Security*, telah menjadi bagian penting dari kerangka global governance. Resolusi-resolusi tersebut menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pencegahan konflik, proses perdamaian, dan pembangunan pascakonflik (United Nations Security Council, 2000). Kerangka normatif ini memberikan tekanan sekaligus panduan bagi negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional (Arshad, 2023). Dalam konteks global governance, resolusi PBB berfungsi sebagai standar internasional yang memengaruhi orientasi kebijakan nasional tanpa menghilangkan kedaulatan negara. Dengan demikian, keberadaan resolusi-resolusi tersebut memperkuat argumentasi bahwa integrasi perspektif gender dalam kebijakan luar negeri bukan sekadar pilihan politik, melainkan bagian dari komitmen global yang bersifat kolektif dan berkelanjutan, serta mendorong konsistensi kebijakan nasional agar selaras dengan norma internasional dan praktik diplomasi yang inklusif.

B. Kontribusi Women Empowerment dalam Pembentukan Arah dan Praktik Diplomasi Indonesia

Kontribusi *women empowerment* dalam pembentukan arah dan praktik diplomasi Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berfungsi sebagai agenda normatif, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam kebijakan luar negeri. Dalam kerangka global governance, keterlibatan perempuan dalam diplomasi memperluas perspektif kebijakan dengan menekankan nilai inklusivitas, dialog, dan pendekatan humanis. Analisis ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan sebagai aktor diplomasi berkontribusi pada transformasi praktik kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin responsif terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata kontribusi tersebut dapat dilihat dari peran Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Fathun, 2024). Kepemimpinan Retno Marsudi menandai penguatan diplomasi Indonesia yang berorientasi pada perdamaian, perlindungan warga negara, dan solidaritas global (United Nations Security Council, 2000). Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten mendorong agenda kemanusiaan dan perdamaian, termasuk keterlibatan perempuan dalam resolusi konflik. Praktik diplomasi ini mencerminkan bagaimana perspektif *women empowerment* diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri yang menekankan keadilan, dialog, dan kerja sama multilateral, sejalan dengan norma global governance (Azizah, 2022).

Selain dalam diplomasi formal negara, kontribusi pemberdayaan perempuan juga terlihat melalui diplomasi non-negara dan peran masyarakat sipil. Tokoh seperti Alissa Wahid menunjukkan bagaimana perempuan Indonesia berkontribusi dalam diplomasi berbasis nilai, khususnya melalui dialog lintas budaya dan agama di tingkat internasional.



Peran ini memperluas makna diplomasi Indonesia, tidak hanya sebagai aktivitas negara, tetapi juga sebagai praktik yang melibatkan aktor non-negara dalam membangun citra dan posisi Indonesia di arena global. Hal tersebut sejalan dengan konsep global governance yang menempatkan berbagai aktor sebagai bagian dari tata kelola internasional. Pemberdayaan perempuan juga memengaruhi praktik diplomasi Indonesia dalam isu-isu nontradisional, seperti kesehatan global dan pembangunan manusia. Keterlibatan perempuan dalam perumusan dan advokasi kebijakan internasional mendorong pendekatan diplomasi yang lebih berorientasi pada keamanan manusia (*human security*), bukan semata-mata kepentingan geopolitik. Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas global dalam kebijakan luar negerinya.

Tabel 3. Contoh Perempuan Indonesia dan Kontribusinya dalam Diplomasi dan Kebijakan Internasional

Nama	Peran / Jabatan	Bentuk Kontribusi Nyata	Relevansi terhadap Diplomasi Indonesia
Retno Marsudi	Menteri Luar Negeri RI	Memimpin diplomasi Indonesia dalam isu kemanusiaan, perdamaian, dan perlindungan WNI di forum internasional	Diplomasi formal negara dan penguatan posisi Indonesia di forum global
Mari Elka Pangestu	Mantan Menteri Perdagangan RI, pejabat Bank Dunia	Mewakili Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional dan institusi global	Diplomasi ekonomi dan representasi Indonesia di lembaga internasional
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan RI	Aktif dalam forum G20, IMF, dan Bank Dunia sebagai wakil Indonesia	Diplomasi ekonomi global dan tata kelola keuangan internasional
Susi Pudjiastuti	Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan	Kebijakan pemberantasan illegal fishing yang mendapat perhatian internasional	Diplomasi maritim dan penegakan kedaulatan Indonesia
Alissa Wahid	Aktivis masyarakat sipil	Dialog lintas agama dan perdamaian di forum internasional	Diplomasi non-negara dan soft power Indonesia
Yuyun Wahyuningrum	Pakar HAM ASEAN	Terlibat dalam mekanisme HAM regional ASEAN	Diplomasi HAM dan norma regional

Sumber: Diolah dari publikasi resmi Kementerian Luar Negeri RI, laporan internasional, dan pemberitaan media

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi perempuan Indonesia dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri tidak terbatas pada ranah





diplomasi formal negara, tetapi juga mencakup diplomasi ekonomi, maritim, hak asasi manusia, serta diplomasi berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi strategis tersebut menunjukkan bahwa *women empowerment* telah berperan dalam memperluas praktik diplomasi Indonesia sejalan dengan dinamika global governance. Kontribusi yang diberikan, meskipun dalam beberapa kasus bersifat sektoral atau spesifik isu, tetap memiliki dampak terhadap citra dan posisi Indonesia di tingkat internasional. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya menghasilkan peningkatan representasi simbolik, tetapi juga memperkaya substansi kebijakan luar negeri melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, praktik diplomasi Indonesia semakin mencerminkan integrasi antara kepentingan nasional dan norma global yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam tata kelola internasional.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi perspektif gender dalam kerangka global governance memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan arah dan praktik kebijakan luar negeri Indonesia. Gender dan *women empowerment* tidak lagi diposisikan sebagai isu pelengkap, melainkan sebagai bagian dari norma global yang memengaruhi legitimasi, orientasi, dan substansi kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, global governance berperan sebagai kerangka normatif yang mendorong negara, termasuk Indonesia, untuk mengarusutamakan perspektif gender melalui partisipasi perempuan dalam diplomasi, kebijakan kemanusiaan, serta kerja sama internasional. Kontribusi perempuan Indonesia, baik dalam diplomasi formal negara maupun diplomasi non-negara, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan mampu memperkaya praktik diplomasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan luar negeri berbasis gender masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal institusionalisasi kebijakan, kesinambungan program, dan penguatan representasi perempuan di posisi strategis. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Indonesia memperkuat integrasi perspektif gender secara lebih sistematis dalam perumusan kebijakan luar negeri melalui regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas lembaga. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji isu ini secara lebih mendalam dengan pendekatan komparatif atau studi kasus spesifik guna memperkaya pengembangan kajian gender dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. A., & Azarine, A. N. (2023). Gender Mainstreaming in Indonesia's Bilateral International Development Cooperation. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(6), 24-35.
- Aziz, F., Sheikh, S. M., & Shah, I. H. (2022). Financial inclusion for women empowerment in South Asian countries. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 30(4), 489-502.
- Azizah, N., Sallimi, H., & Dwiyantri, A. (2022). The Increasing Number of Female Troops in Indonesia's Peacekeeping Operations: Why Women's Presence Matters?. *Journal of Islamic World and Politics*, 6(1), 81-103.
- Azizah, N., Hidayatulloh, M. A., Perwita, L. C., & Maksum, A. (2021). 'Velvet Triangles' in Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 59-71.



- Achuo, E., Asongu, S., & S Tchamy, V. (2022). Women empowerment and environmental sustainability in Africa.
- Arshad, A. (2023). Nexus between financial inclusion and women empowerment: evidence from developing countries. *Gender in Management: An International Journal*, 38(4), 561-580.
- Anggraheni, P., Hanura, M., Subhan, M., Setyaningsih, D., & Diaz, Y. G. (2024). Gender Disparities in Climate Resilience: Amplifying Voices of Women in Climate Change Issue in Indonesia's Chairmanship of ASEAN 2023. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1(1), 157-173.
- Andriamahery, A., & Qamruzzaman, M. (2022). Do access to finance, technical know-how, and financial literacy offer women empowerment through women's entrepreneurial development?. *Frontiers in psychology*, 12, 776844.
- Akter, S., Rutsaert, P., Luis, J., Htwe, N. M., San, S. S., Raharjo, B., & Pustika, A. (2017). Women's empowerment and gender equity in agriculture: A different perspective from Southeast Asia. *Food policy*, 69, 270-279.
- Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179-207.
- Costinot, A., & Bahmani-Oskooee, M. (2023). The influence of work discipline and work spirit on medical employee performance in the women's empowerment office of population control and family planning in the city of Texas. *Medalion Journal: Medical Research, Nursing, Health and Midwife Participation*, 4(2), 41-48.
- Desai, S., Chen, F., Reddy, S., & McLaughlin, A. (2022). Measuring women's empowerment in the global south. *Annual Review of Sociology*, 48(1), 507-527.
- Fathun, L. M. (2024). The Role of Women in the Reformulation of Indonesia's Foreign Policy in the Era of Minister Retno Marsudi to Achieve World Peace. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 14(2).
- Firdaus, F., & Wulandari, R. A. (2023). Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 138-153.
- Islam, M. A., Hassan, M., Ahmad, K. U., & Bayazid, M. (2023). Empowering Perspectives: Analyzing Gender Dynamics in International Politics.
- Martyn, E. (2004). *The Women's Movement in Postcolonial Indonesia: gender and nation in a new democracy*. Routledge.
- Mubeen, S., Shahid, M. H., Sahawneh, N., Al-Kassem, A. H., Ahmad, A., & Naseer, I. (2022, February). Education, Employment and Women Empowerment in an Agrarian Economy: A Case Study. In *2022 International Conference on Business Analytics for Technology and Security (ICBATS)* (pp. 1-9). IEEE.
- Parveen, M. (2022). Women empowerment: New paradigm shift of Saudi women into labor workforce. *Society and Business Review*, 17(1), 66-91.
- PeaceWomen. (n.d.). *Security Council resolutions on women, peace and security*. Women's International League for Peace and Freedom.
- Prajuli, W. A., Yustikaningrum, R. V., & Amurwanti, D. N. (2021). How gender socialization is improving women's representation in Indonesia's Foreign affairs: breaking the ceiling. *Australian Journal of International Affairs*, 75(5), 527-545.
- Quisumbing, A., Cole, S., Elias, M., Faas, S., Galiè, A., Malapit, H., ... & Twyman, J. (2023). Measuring women's empowerment in agriculture: Innovations and evidence. *Global Food Security*, 38, 100707.



- Reshi, I. A., & Sudha, T. (2022). Women empowerment: a literature review. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 2(6), 1353-1359.
- Rüland, J. (2017). Democratizing foreign-policy making in Indonesia and the democratization of ASEAN: A role theory analysis. *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia*, 5(1), 49-73.
- Ricarvy, Z. A. K., & Wahyuningroem, S. L. (2024). Feminist Policy Analysis on Gender Mainstreaming Policy in Indonesian International Peacekeeping Forces. *Jurnal Politik*, 10(1), 3.
- Rosyidin, M. (2017). Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century. *South East Asia Research*, 25(2), 175-191.
- United Nations Security Council. (2000). *Resolution 1325 (2000) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2009a). *Resolution 1888 (2009) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2009b). *Resolution 1889 (2009) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2013). *Resolution 2122 (2013) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2015). *Resolution 2242 (2015) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2019a). *Resolution 2467 (2019) on women and peace and security*. United Nations.
- United Nations Security Council. (2019b). *Resolution 2493 (2019) on women and peace and security*. United Nations.
- UN Women. (2022). *Security Council resolutions on women, peace and security*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
- Veronika, N., & Afrianty, D. (2025). Special issue editorial: gender and security in the Indo-Pacific. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 20(4), 425-433.
- Wuryandari, G., Alami, A. N., Ramadhan, M. S., Prabaningtyas, R. R. F., & Prihatini, E. S. (2025). Gender and Foreign Policy: Examining Indonesia's Digital Diplomacy on X. *Gender Issues*, 42(4), 39.
- WPS Focal Points Network. (n.d.). *United Nations frameworks on women, peace and security*
- Wardhani, L. K. (2020). *Gender in global agreements and national arguments: The Indonesian Experience* (Doctoral dissertation, The Australian National University (Australia)).
- Yartseva, M. (2020). Global goals on local level: How do civil society organizations in Indonesia working with gender equality, female empowerment and female entrepreneurs frame the Sustainable Development Goals and local challenges?.